

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pemanfaatan Dana Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Indramayu Tahun 2012-2016, diantaranya adalah :

1. Ada tiga cara pengiriman dana remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke keluarganya di Kabupaten Indramayu : (a) Jalur Formal Bank, (b) Jalur Formal Non Bank, (c) Jalur Informal. Dan mayoritas tenaga kerja indonesia (TKI) di Kabupaten Indramayu memilih jalur formal non bank. Seperti Toko Indo, Western Union, MoneyGram dan BNI Express sebab waktu pengirimannya cepat dan *outlet*-nya dimana-mana.
2. Secara umum pemanfaatan dana remitansi TKI di Kabupaten Indramayu dapat digambarkan menjadi 3 bagian, *pertama* untuk kebutuhan konsumtif, *kedua* untuk kebutuhan produktif dan *ketiga* untuk kebutuhan ukhrawiyah. Maka hasil penelitian di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa pada umumnya TKI menggunakan gaji setiap bulan yang dikirimkan ke keluarganya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Akan tetapi ada sebagian desa di Kabupaten Indramayu yang pemanfaatan dana remitansinya sebagian besar digunakan untuk usaha produktif, yaitu Desa Kenanga Kecamatan Indramayu yang ditetapkan oleh Kementrian Tenaga Kerja menjadi Desa Migran Produktif (Desmigratif). Juga penemuan di Desa Sliyeg Kecamatan Indramayu mengungkapkan bahwa dana remitansi bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan ukhrawiyah, yaitu dengan dibuatkannya Pondok Pesantren dari

sumbangan para TKI sebagai tempat mengaji dan mendalami ilmu agama anak-anak TKI yang berada diluar negeri khususnya dan umumnya untuk orang lain.

3. Faktor penghambat pemanfaatan dana remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu Tahun 2012-2016, diantaranya adalah : (a) Banyaknya masalah yang terjadi pada TKI di Kabupaten Indramayu disebabkan karena minimnya pengetahuan dan keterampilan kerja untuk penempatan kerja di luar negeri serta TKI mau cepat beres, yang penting langsung berangkat jadi TKI dan menghasilkan uang tiap bulannya, (b) Banyak TKI di Kabupaten Indramayu yang memilih jalur ilegal melalui agen-agen palsu yang mengiming-imingi janji manis, menggunakan *visa visit* ataupun berangkat sendiri, (c) Banyak TKI di Kabupaten Indramayu yang berpindah tempat kerja tanpa ijin dan ilegal, sehingga banyak yang dideportasi dipulangkan sebelum kontrak kerjanya selesai, (d) Menggunakan sarana remitansi informal akibat kurangnya pengetahuan remitansi yang benar, (e) Kurangnya *outlet cash-in* formal yang berada dalam jangkauan TKI dan masih terbatasnya *outlet cash-out* sehingga membutuhkan biaya dan waktu, serta masih rendahnya tingkat literasi keuangan TKI dan keluarganya, (f) Dana remitansi TKI tidak masuk dalam pendapatan daerah di Kabupaten Indramayu. Sedangkan faktor pendukung pemanfaatan dana remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu Tahun 2012-2016, diantaranya adalah : (1) Pengurangan Pengangguran, (2) Pengurangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Pendidikan Masyarakat, (4) Penambahan Pengalaman dan Meningkatkan Wawasan, (5) Perolehan Ketrampilan Baru dan *Brain Gain*, (6) Perolehan Dana Remitansi yang Besar, (6) Menjadi Duta Kebudayaan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat harus membuat kantor cabang Bank Indonesia di 142 negara yang didalamnya sudah ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja mencari nafkah disana, karena masih banyak TKI yang menggunakan jalur informal untuk mengirimkan dana remitannya disebabkan tidak adanya akses perbankan di tempat TKI bekerja. Juga untuk memudahkan proses pengiriman dana remitansi TKI diluar negeri dan ini akan meningkatkan jumlah devisa negara di Indonesia. Semakin banyak TKI menghasilkan upah dan mengirimkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Semakin besarnya juga pertumbuhan devisa negara maka berimbang pada tinginya tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia.
2. Pemerintah pusat harus membuat peraturan untuk mewajibkan kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri untuk mengikuti program edukasi dan literasi keuangan. Agar supaya melek keuangan, dan dapat mengelola remitan yang dihasilkan kepada hal-hal yang produktif. Tujuannya, agar supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.
3. Pemerintah pusat juga harus membuat program pelatihan kepada para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri dan tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar TKI yang bekerja di luar negeri benar-benar profesional. Dan ini akan mengurangi tingkat pengaduan masalah TKI di Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu.